



KETERPISAHAN ANTARA FAKTA FIKSI DAN FAKTA FAKTUAL: KRITIK ATAS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN (PBS) KARYA ABIEDAH EL KHALIEQY

Miftakhul Anam^{)}*

^{*)} Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto.

Abstract: Novel *Perempuan Berkalung Sorban (PBS)* by Abiedah El Khaleqy have been created through a very subjective exploration through the assumptions that shaped suspicion. The novel as a whole illustrates idealitas Islamic educational institutions to replace the institutions that do injustice. Islamic School is so factually ideality in accordance with the novel, and the realities that are not in accordance with these idealities purely fictional, born of a research capitalize gender prejudice and sentiment. **Keywords:** Novel, Abiedah El Khaleqy, women oppression.

A. PENDAHULUAN

Semenjak kesadaran atas eksistensi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan muncul, maka berbagai kajian gender muncul di hampir semua ranah kehidupan manusia. Kajian tersebut merupakan usaha melahirkan posisi ideal antara laki-laki dan perempuan. Ideal di sini identik dengan setara yang berangkat dari asumsi adanya ketidakadilan yang banyak dialami kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut muncul melalui budaya yang dilembagakan dan menjadi ideologi, yakni budaya patriarkhi. Budaya ini melahirkan stratifikasi antara laki-laki dan perempuan, yakni perempuan merupakan makhluk kelas dua.

Bidang sastra telah lama menjadikan kajian ini sebagai lapangan observasi dan menjadikannya dalam bentuk karya sastra. *Bumi Manusia* karya monumental Pramudia Ananta Toer berupaya menggambarkan seorang perempuan perkasa yang ternyata masih kalah oleh penjajahan patriarkhis ini. Selanjutnya, tulisan-tulisan Ayu Utami sebagian besar merupakan refleksi dari penderitaan yang dialami kaum perempuan. Adapun karya sastra kontemporer yang sempat menuai kontroversi adalah novel *Perempuan Berkalung Sorban (PBS)* karya Abiedah El Khaleqy. Kontroversi muncul karena novel tersebut berusaha mencitrakan pesantren sebagai lembaga yang ikut serta dalam membangun budaya patriarkhi secara nyata melakukan ketidakadilan kepada perempuan.

Tulisan ini bermaksud mengkaji novel PBS dalam konteks pencitraan yang dilakukan terhadap pesantren tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seputar adakah justifikasi Islam (dalam hal ini diwakili pesantren) terhadap budaya patriarkhi, adakah titik temu antara fakta fiksi dalam novel PBS dan fakta faktual dalam pesantren, serta asumsi apa yang melandasi pembuatan novel tersebut, menjadi bagian dari pembahasan tulisan ini.

B. MEMPERSEPSI DAN MEMOSISIKAN BUDAYA PATRIARKHI DARI PERSPEKTIF ISLAM



Patriarkhi merupakan sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Dalam setiap bentuk historis masyarakat yang patriarkhis baik yang feodal, kapitalis maupun sosialis, maka sebuah sistem berdasarkan gender dan jenis kelamin serta diskriminasi ekonomi beroperasi secara simultan. Patriarkhi mempunyai kekuatan dari akses laki-laki yang lebih besar terhadap, dan menjadi mediasi dari, sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan di luar rumah.¹

Dengan demikian, sistem patriarkhi terbentang melingkupi seluruh aspek kehidupan kemanusiaan. Sistem politik yang memberi otoritas, sosial masyarakat yang menjustifikasi, dan sistem perekonomian yang mengukuhkannya. Sistem yang juga diidentifikasi melalui dominasi laki-laki ini menyentuh semua bentuk masyarakat, baik yang telah maju layaknya demokratis dengan ciri kapitalisnya, aristokrasi dan ideologi mutlak keagamaan tertentu dengan masyarakat feodalnya, maupun masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan dalam bentuk sosialis.

Patriarkhi merupakan budaya yang mendasarkan segala hal menurut kepentingan laki-laki. Pemfokusan kepentingan laki-laki secara langsung berdampak kepada marginalisasi isu-isu perempuan di dalam masyarakat yang mengidentifikasikan diri dalam budaya tersebut. Margaret Mead (1901-1978) menegaskan bahwa pembahasan perempuan telah dipinggirkan dari awal karena adanya konstruksi masyarakat patriarkal dalam pendefinisian posisi perempuan.²

Pendefinisian terhadap posisi perempuan sendiri mempunyai pelaku yang multi. Di sini, terlihat peran budaya yang terkonstruks melalui konsensus laki-laki yang kemudian –tanpa disadari– diamin oleh perempuan. Selanjutnya, agama tidak bisa tidak memberi kontribusi yang nyata dalam terwujudnya masyarakat patriarkal.

Budaya patriarkhi menciptakan hirarki antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan selalu menjadi manusia level kedua. Pelevelan ini diterjemahkan di dalam segala aspek kehidupan perempuan, yakni mulai dari wilayah privat seperti hak reproduksi, ekonomi, politis, dan tentu saja kehidupan beragama perempuan.³

Dengan menemukan posisi ideal yang diinginkan agama terhadap perempuan maupun laki-laki, maka akan ditemukan pandangan Islam terhadap budaya patriarkal. Parktek sosial dewasa ini lebih didominasi oleh isu ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki, dan fenomena ini tampaknya terbentuk oleh hirarki yang *invisible* yang terbentuk melalui budaya patriarkal.

Konsep "patriarkhi" ini penting bagi feminisme kontemporer karena feminisme memerlukan istilah untuk mengekspresikan totalitas relasi yang menindas dan eksploitatif yang mempengaruhi perempuan. Di luar penggambaran ini, setiap teori feminis menemukan bahwa berbagai patriarkhi memunculkan gaya yang beragam dalam melakukan subordinasi perempuan. Sebagai satu misal, Firestone mendefinisikan patriarkhi dalam bentuk kontrol laki-laki terhadap reproduksi perempuan.⁴

Isu peminggiran terhadap perempuan sendiri terbentang mulai dari wilayah khusus sampai yang umum, atau dengan istilah lain dari wilayah privat keluarga sampai dengan wilayah publik. Wilayah privat yang menjadi pusat perdiskusian feminisme adalah mengenai hak-hak dan kewajiban suami maupun istri, sehingga "keluarga" menempati posisi yang urgen dalam kajian feminis. Dalam kaitan ini, sebagian feminis telah sampai kepada tahap tidak relevan lagi institusi keluarga dalam masyarakat modern.⁵

Masyarakat patriarkhal memiliki tradisi yang menjadikan kekuasaan dan pimpinan pada seorang petinggi keluarga atau kelompok. Kedudukan laki-laki sangat terhormat secara fisik dan sosial,



sedangkan derajat perempuan adalah hina. Praktek tradisi ini menjadikan garis keturunan melalui pihak bapak. Anak menyandang nama bapaknya.⁶

Patriarkhi menciptakan satu bentuk kelas atau hirarki berdasarkan perbedaan gender. Sistem kelas patriarkhal yang terbentuk –di dalam banyak negara- telah merasuk ke dalam aturan-aturan yang mengekang gerak perempuan.⁷ Di Mesir diberlakukan Undang-Undang *Ahwal Syakhshiyah (personal status law)* yang membuat suami berkuasa penuh atas istrinya, berhak atas tubuh dan akal istri, dapat mengurungnya jika diperlukan, istri tidak dapat bepergian tanpa izinnya.⁸ Di Indonesia relatif lebih baik. Perempuan dalam keluarga secara hukum-hukum formal haknya tidak terlalu terganggu. Akan tetapi, secara faktual, masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Ini terlihat –sebagai misal- masih seringnya berita kekerasan dalam rumah tangga menghiasi televisi.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang hanya 30 persen dalam ranah politik ternyata juga belum efektif diterapkan. Keterwakilan perempuan sendiri sebenarnya dapat dijadikan polemik antara aturan keterwakilan ini membela hak-hak perempuan atau sebaliknya mereduksi hak-hak tersebut. Aturan tersebut ingin melibatkan perempuan lebih jauh dalam urusan publik, tetapi aturan tersebut menjadi penegas ketidakmampuan perempuan dalam urusan publik. Tidak jelas alasan ada angka 30 persen menjadi pertanyaan yang patut diajukan. Ini juga dapat dijadikan serangan untuk para feminis yang memperjuangkan angka-angka itu, jika perempuan memang mampu (termasuk dalam hal meyakinkan konstituen) tentunya tidak lagi memerlukan aturan tersebut.

Dari perspektif historis, paham patriarkhal dalam masyarakat juga dinilai telah membelenggu kehormatan perempuan terutama ketika laki-laki menempatkan diri sebagai tuan, dan perempuan sebagai hamba. Perempuan dilarang bekerja karena ditakutkan akan menyaingi dominasi laki-laki. Perempuan yang bekerja dan mendapatkan penghasilan relatif dapat mandiri dan dapat melepaskan diri dari ketergantungannya dengan laki-laki. Dengan demikian, para perempuan yang bekerja akan dapat mempertahankan kehormatannya. Demikian bagian dari pendapat Nawal al-Sa'dawi.⁹

Feminis Marxis memandang penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Oleh karena itu, isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Sementara itu, golongan radikal melihat akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi laki-laki –di mana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki diyakini sebagai bentuk penindasan. Patriarkhi, yakni ideologi kelelakian sehingga laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan.¹⁰

Feminis Indonesia, Gadis Arivia menggambarkan patriarkhi secara analogik. Ia berangkat dari perkataan Audre Lorde, "peralatan sang tuan tidak akan dapat membongkar rumah sang tuan". Menurut Arivia, secanggih apa pun "peralatan" yang dipunyai tidak akan dapat membongkar cara berada dan cara berpikir masyarakat patriarkhal (ia menekankan kepada dominasi pemikiran laki-laki dalam pemaknaan terhadap patriarkhi) bila peralatan tersebut terbuat dari masyarakat yang sama. *Master's tool* di sini adalah laki-laki, demikian pula *master's house*. Selama berabad-abad lamanya, orang di Indonesia telah hidup dalam budaya hasil produk masyarakat patriarkhal yang menjejantah dalam segala aspek kehidupan manusia.¹¹

Berbagai aliran feminisme memperlihatkan perbedaan dalam hal subordinasi terhadap perempuan dalam sistem masyarakat yang patriarkhal. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menghilangkan kesamaan dalam substansinya bahwa feminisme memandang budaya patriarkhal sebagai budaya yang melakukan ketidakadilan bagi perempuan. Perbedaan terlihat mencolok ketika mengetahui bahwa sebagian feminis melihat gaya hidup yang dinilai menyimpang dari sudut pandang agama dan moral



sebagai salah satu ekspresi perempuan yang eksistensinya tidak perlu diributkan. Pandangan yang demikian berangkat dari awal mula terjadinya ketidakadilan yang mereka sangkakan. Agama dan moral menjadi dua hal yang dijadikan tertuduh sebagai pelaku. Tulisan berikut akan mengkaji ketidakterkaitan Islam—sebagai salah satu agama paling berpengaruh di dunia—terhadap ketidakadilan terhadap perempuan tersebut.

Beberapa feminis menyertakan Islam sebagai agama yang berperan serta dalam pembentukan masyarakat patriarkhal yang tidak adil terhadap perempuan. Ketidakadilan Islam dapat dikaji dari beberapa isu yang dinilai masih kontroversial di dalam Islam sendiri. Inventaris isu-isu tersebut beberapa di antaranya berikut dalam sebuah pembahasan.

1. Islam dan Ketidakadilan terhadap Perempuan

Selama ini, Islam banyak dikatakan termasuk pihak yang melakukan subordinasi, penomorduaan, marginalisasi, dan pemosisian yang timpang terhadap kaum perempuan. Kajian posisi perempuan yang masih menuduh Islam melakukan subordinasi terhadap perempuan bisa jadi kajian itu bersifat ahistoris. Sebagaimana diketahui, kedatangan Islam antara lain melakukan reformasi sosial, posisi perempuan menjadi salah satu target dalam proses itu.

Budaya patriarkhal memang tidak dapat disangkal keberadaannya dalam Islam. Budaya tersebut tampaknya hanya mempunyai sekat tipis dengan aspek syariat, di mana keberadaan budaya dimaksud mendapat justifikasi dari ayat-ayat yang dinilai kaum feminis bersifat bias gender. Pendapat ini dikemukakan oleh Nawal al-Sa'dawi, tetapi dalam buku yang sama disangkal oleh Hibah Rauf Izzat.¹²

Dalam hal ini, perlu dibedakan idealitas Islam ketika melihat hubungan laki-laki dan perempuan dan realitas Islam dalam hal menyandarkan diri pada budaya patriarkhal. Pertanyaannya adalah realitas apa saja yang menggambarkan eksistensi budaya patriarkhal dalam Islam (jika ada) di satu sisi, dan di sisi lain apakah realitas-realitas tersebut memang seharusnya terjadi sesuai dengan idealitas ajaran Islam?

Sejak awal telah dinyatakan bahwa kedatangan Islam antara lain untuk melakukan reformasi sosial. Reformasi sosial yang dilakukan oleh Islam terlihat juga dalam bidang keperempuanan. Beberapa isu dalam Islam yang menjadi perdebatan apakah Islam melakukan subordinasi kepada perempuan dan sekaligus menunjukkan kuatnya budaya patriarkhal dalam Islam antara lain sebagai berikut.

Pertama, poligami. Poligami mencerminkan realitas sosiologis kaum laki-laki dan budaya patriarkhis-Arab yang diakomodir serta dimodifikasi Islam.¹³ Poligami yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi pada kenyataannya telah dilakukan masyarakat pra-Islam dengan tanpa aturan. Islam kemudian membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya empat¹⁴ dengan disertai persyaratan yang cukup berat berupa terpenuhinya aspek keadilan.

Persyaratan keadilan inilah yang sekarang dijadikan titik tengkar antara pro dan yang kontra terhadap poligami. Adil, bagi kelompok yang menolak poligami merupakan satu hal yang hampir tidak mungkin dilakukan manusia. Karena keadilan bersifat rasa, maka untuk memberikan rasa yang seimbang di antara para istri menjadi sangat sulit diukur. Sementara itu, salah satu pendapat menyatakan bahwa keadilan yang dicontohkan oleh Nabi bersifat fisik-terlihat, bukan hati di mana hati bukanlah wilayah kekuasaan manusia.¹⁵ Baik pendukung maupun penolak poligami, mendasarkan diri pada surat an-Nisa ayat 3 berikut:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut



tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Penafsiran keadilan yang bersifat lahir ini menjadikan praktek poligami lebih sederhana dan mudah. Akan tetapi, jika mengingat pada tujuan awal berumah tangga berupa terwujudnya kebahagiaan, hal ini menjadi lain. Kebahagiaan hanya dapat dirasakan melalui hati, apakah terdapat kebahagiaan diantara para istri seorang laki-laki yang melakukan poligami memang belum ada kajiannya. Melalui pendekatan psikologis, seorang perempuan yang dimadu mempunyai kecenderungan untuk cemburu, merasa kurang berharga, dan tersia-siakan karena keberadaannya ternyata belum mencukupi bagi suaminya. Seorang perempuan dapat merasakan kebahagiaan dengan beban psikologis demikian tentunya sangat jarang ditemukan.

Poligami bagi orang umum sedikit banyak melakukan pemosisian yang tidak adil bagi perempuan. Ketidakadilan ini berasal dari rendahnya kemampuan orang awam dalam mewujudkan tujuan awal pernikahan ketika memiliki lebih dari satu istri. Berbeda dengan orang-orang yang diberi anugerah khusus yang dengan itu mampu menjaga harmoni dalam rumah tangganya meski memiliki lebih dari satu istri. Hal ini sebagaimana terlihat dalam rumah tangga beberapa kiai di pesantren-pesantren besar di Jawa Timur. Hal ini sangat sulit ditemukan dalam rumah tangga orang awam.

Terlepas dari pro-kontra poligami, oleh banyak feminis keberadaannya menunjukkan masih kuatnya budaya patriarkhal yang mendapat justifikasi melalui teks-teks suci. Sifat permisif Islam terhadap poligami tidak demikian halnya dengan poliandri.

Kedua, budaya patriarkhal dalam Islam tercermin melalui asal penciptaan Hawa dari tulang rusuk laki-laki.¹⁶ Pemahaman permulaan penciptaan perempuan yang dari bagian tubuh laki-laki ini memberi citra terhadap perempuan bahwa mereka merupakan makhluk kedua yang "hanya" tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Sebagian pemikir menafsirkan pemahaman terhadap penciptaan perempuan yang berasal dari hadis Nabi SAW ini secara berbeda. Quraish Shihab menulis pemikirannya sebagai berikut:

"Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan (majazi), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan kaum perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana meluruskan tulang rusuk yang bengkok."¹⁷

Konsepsi teologis yang menganggap Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomis dan politik. Hal ini terisyarat oleh besarnya perhatian terutama kaum feminis terhadap kajian ini. Kalangan feminis Yahudi dan Kristen cenderung mengartikan kisah-kisah itu secara simbolis yang perlu diberi muatan makna lain. Adapun feminis Islam seperti Mernisi cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (*sanad*), materi (*matan*), dan asal-usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadits yang dinilai memojokkan perempuan, yang diistilahkan dengan Hadits-hadits *misoginis*.¹⁸

Efek dari pemahaman tentang asal-usul penciptaan perempuan tersebut secara umum membawa kesan marginalisasi terhadap perempuan. Perempuan seakan-akan memang pantas diposisikan sebagai *the second human being*, manusia kelas kedua. Perempuan bukanlah makhluk yang utama, ia hanya diciptakan dari, dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas di depan, dan tidak pantas menjadi pemimpin dan seterusnya.¹⁹

Ketiga, bagian warisan perempuan. Dalam surat an-Nisa ayat 11-12 telah diterangkan secara terperinci masalah pembagian warisan. Tentu tidak relevan menerangkan perincian tersebut di sini.



Adapun yang menjadi pokok persoalan kaitannya dengan feminisme adalah ketentuan seorang perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki. Asghar Ali Engineer²⁰ yang termasuk feminis muslim, melihat ketentuan itu diskriminatif. Menurutnyanya, perempuan selain mendapat warisan, setelah menikah ia akan mendapatkan mas kawin dari suami. Di sisi yang lain, ia juga tidak mempunyai kewajiban apa pun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya karena sudah ditanggung oleh suaminya.

Asghar mengkritik penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan ini sebagai alasan bahwa Islam menganggap perempuan lebih rendah nilainya daripada laki-laki. Pandangan ini sangat keliru, karena kesetaraan antara laki-laki masuk pada kategori moral, sedangkan warisan masuk dalam wilayah ekonomi.

2. Islam Menolak Sistem Patriarki

Islam merupakan agama yang *rahmatallil'amin*. Ini tidak bisa diperdebatkan karena tidak mengandung keraguan sama sekali. Kedatangan Islam bermisikannya menyelamatkan manusia dari kehancuran, membimbing manusia dari kesesatan menuju jalan kemuliaan berdasarkan cinta kasih baik secara vertikal maupun horisontal (*hablumminallah wa hablumminannas*). Inilah perjuangan Islam yang termanifestasikan oleh gerakan para pembelanya.

Perjuangan Islam ini dengan cara melakukan dialektika dengan tradisi lokal. Tradisi yang kemudian teridentifikasi sebagai budaya masyarakat eksistensinya bersifat abadi, yaitu selama masyarakat tersebut masih dapat mempertahankan kehidupannya bisa dipastikan mereka memiliki budaya yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja budaya bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat. Contoh, globalisasi cukup memberi signifikansi yang nyata adanya perubahan budaya suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, dialektika antara agama dan budaya juga tidak pernah berhenti. Dialektika ini tidak berhenti di satu level, tetapi kontinuitasnya terjaga.

Perlu diingat bahwa posisi perempuan saat ini dalam perspektif teks-teks suci yang ditafsirkan para ahli agama pada dasarnya juga melandaskan diri pada dialektika dengan agama. Kajian doktrin agama ini bertujuan mengetahui tanggapan Islam terhadap budaya patriarkhal.

Serangan kaum feminis Barat terhadap Islam sebenarnya merupakan bentuk ketidaktahuan mereka akan ajaran Islam. Mereka cenderung hanya melihat realitas sosiologis dan mengesampingkan idealitas ajaran Islam. Kajian yang mereka lakukan terhadap Islam terkesan parsial dengan mengambil beberapa dalil yang kemudian didealektikkan dengan realitas per kasus. Kajian feminis yang terpaku hanya pada realitas akan menemukan fakta-fakta yang cenderung menimbulkan kemarahan yang emosional dan kemudian mencari kambing hitam. Ketika realitas tidak sesuai dengan idealitas, tentu tidak rasional jika idealitas yang tercermin dari doktrin-doktrin agama dipersalahkan. Ini kemudian kembali ke pertanyaan yang telah sering diajukan, yakni posisi agama Islam yang ajarannya bersifat relevan di setiap waktu dan tempat ini.

Pembelaan terhadap agama Islam atas serangan sebagian kaum feminis telah dilakukan beberapa pihak. Hal ini karena sebenarnya Islam memang tidak melakukan kemungkaran apapun terhadap umat manusia. Sebaliknya, hal itu mempunyai misi mendatangkan *rahmatan lil 'amin*. Dalam kaitan itu, Islam telah melakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan, seperti hak mendapat warisan bagi perempuan²¹, memanusikan perempuan, beratnya syarat poligami dari semula tanpa batasan, dan perubahan revolusioner lainnya. Islam tidak mengenal dan jelas sangat menolak sistem



patriarkhi, tentunya jika patriarkhi dipahami sebagai konsep yang menandatangani ketidakadilan kepada perempuan.

Jika yang mereka sangkakan sebagai bentuk patriarkhi dalam Islam adalah konsep kepemimpinan (*al-qawwamah*), maka Islam memang mengakui adanya kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Akan tetapi, tidak tepat jika menyamakan konsep kepemimpinan²² dengan patriarkhi.

Ada perbedaan yang signifikan antara patriarkhi dan konsep kepemimpinan dalam Islam. Jika patriarkhi (lihat kembali pembahasan tentang konsep patriarkhi di awal bagian tulisan ini) teridentifikasi sebagai sebuah konsep yang banyak menandatangani ketidakadilan terhadap perempuan, kepemimpinan (*al-qawwamah*) tidaklah demikian. Konsep kepemimpinan yang ditawarkan Islam menerapkan prinsip musyawarah yang mengandung konsekuensi logis berupa *partnership*.

C. TRADISI KAUM PESANTREN: BUDAYA PATRIARKHI ATAU KEPEMIMPINAN

Dengan asumsi bahwa ajaran Islam merupakan *rahmatat lil'alam* yang mustahil melakukan ketidakadilan kepada manusia berdasarkan apapun termasuk gender. Dalam hal ini, pesantren merupakan institusi yang menjadi ujung tombak pendidikan Islam, maka ditemukan hipotesis bahwa pesantren tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya ketidakadilan. Jika patriarkhi dipahami sebagai sebuah sistem maupun ideologi laki-laki yang banyak merugikan kaum perempuan, maka pesantren tentu menolaknya.

Peran laki-laki dan perempuan sebenarnya telah terpetakan secara jelas dalam ajaran Islam dan ini yang diterapkan oleh pesantren. Ketika terjadi dominasi laki-laki dalam pesantren tidak bisa dipahami sebagai bentuk penguasaan atas perempuan. Adapun yang ada adalah konsep kepemimpinan Islam yang diterapkan dalam pesantren sehingga mempertemukan konsep patriarkhi dan kepemimpinan.

Sebelum mengkaji atas kepemimpinan dalam pesantren, terdapat beberapa isu yang menjadi landasan atas timbulnya kecurigaan tentang adanya ideologi patriarkhi dalam pesantren. Isu-isu tersebut sebenarnya sama saja isu-isu di luar pesantren yang menjadi fokus perhatian para feminis. Hanya saja, pesantren kali ini menjadi semacam miniatur dunia ketidakadilan terhadap perempuan. Ini yang dituduhkan sebagian pihak terhadap pesantren, termasuk di antaranya oleh Abiedah melalui novel PBS.

Abiedah mendeskripsikan banyak ketidakadilan yang dialami perempuan di dalam pesantren. *Pertama*, pencitraan perempuan melalui indoktrinasi teks-teks suci. Hal ini berkaitan dengan kurikulum pesantren yang memasukkan materi-materi yang dinilai bias gender. Sebagai sebuah contoh, kitab *'uqud al-Lujjiayn* merupakan kitab wajib pesantren. Kitab ini memuat penafsiran atas hadits-hadits mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Uraian dalam kitab tersebut merupakan pembelaan atau argumen-argumen teks suci maupun pendapat ulama atas isu-isu yang selama ini menjadi perhatian para feminis. Kritik tersebut dijawab oleh pesantren dengan terbitnya buku *"Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: 'Uqud al-Lujjiayn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Suci"*.²³ Secara komprehensif, kitab itu membahas mengenai poligami, mahar untuk istri, peran istri dalam rumah tangga, konsep kepemimpinan dalam keluarga dan publik, hubungan biologis suami-istri, dan isu-isu lain. Kitab yang dinilai bias gender oleh kaum aktivis perempuan ini, rasanya tidak perlu diuraikan berpanjang lebar di sini. Isu-isu yang mengemuka merupakan refleksi dari realitas khususnya dalam feminisme yang telah terjawab oleh para pembela Islam.

Akan tetapi, perlu juga untuk membahas poligami di dunia pesantren. Pesantren merupakan lingkungan yang cukup permisif terhadap praktek poligami. Memang ada beberapa pesantren yang tidak

melakukan poligami, tetapi mereka tidak pula menolak pesantren lain (katakanlah kiainya) untuk berpoligami.

Sangat menarik bahwa sifat permisif dunia pesantren terhadap poligami tidak terlalu menimbulkan gejala dalam masyarakat. Dari kaum feminis, ada yang mengirimkan kritik terhadap realitas ini. Kritik tersebut tidak terlalu menarik perhatian publik. Dalam konteks ini, perlu mengaitkannya dengan syarat adil dalam poligami, keilmuan atau keistimewaan orang-orang tertentu, berbagai aspek lain secara komprehensif dan holistik sehingga kesimpulan yang didapatkan tidak bernada sentimen berlebihan.

D. KETERPISAHAN FAKTA FAKTUAL DAN FAKTA FIKSI: KRITIK ATAS NOVEL *PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN* (PBS)

Dengan asumsi bahwa sastra tidak pernah lahir dari kekosongan budaya,²⁴ Abiedah terkesan mengeksplorasi budaya pesantren secara tidak adil. Ada usaha untuk mencampuradukkan secara paksa antara idealitas pesantren yang menjunjung tinggi norma-norma Islam dengan realitas sosial yang dilandasi semangat patriarkhis dengan hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Satu fakta yang tidak terbantah adalah Islam menjadi rahmat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keutamaan manusia tidak dikarenakan seorang laki-laki atau perempuan. Ini mengandung makna bahwa tidak ada hegemoni satu pihak terhadap pihak lain dalam konteks perbedaan gender.

Sementara itu, realitas sosial yang memberi nasib tidak adil kepada perempuan semata-mata merupakan realitas yang terbentuk atas komunikasi dan interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak berlandaskan kepada nilai-nilai pesantren yang Islami. Nilai-nilai ketidakadilan itu sesungguhnya merupakan ideologi di mana pesantren berusaha mereduksinya.

Usaha Abiedah mencampuradukan antara idealitas dan realitas ini terkesan dipaksakan melalui beberapa bagian di dalam novelnya. Ketidakadilan Abiedah—yang selanjutnya saya menyebutnya sebagai keanehan fakta fiksi dalam PBS—tampak dalam hal-hal berikut:

1. Penyamaan perempuan dengan binatang. Di awal-awal novel PBS, Abiedah mengeksplorasi adanya budaya penyamaan antara kaum perempuan dengan binatang. Ini tercermin dari dialog antara tokoh Annisa dengan Rizal yang keduanya masih berusia anak-anak.

”Aku tahu bedanya.”

”Apa? Ayo katakan.”

”Yang satu binatang, satunya manusia.”

”Tapi kan sama-sama perempuan”.

(PBS, hal 3)

Usia yang masih anak-anak tersebut cukup menarik untuk didramatisir dalam analisis ini. Di satu sisi, usia anak-anak merupakan usia seseorang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang ideal dan pragmatis. Sebaliknya, usia tersebut dapat dimaknai sebagai usia yang masih steril dari nilai-nilai kebohongan. Anak-anak cenderung mengatakan sesuatu dengan jujur sesuai dengan pengetahuan yang didapat dari interaksi dengan lingkungan sepanjang usianya.

Seorang anak mengalami perkembangan fantasi, di mana salah satu fase dari perkembangan itu adalah *robinson crusoe*. Dalam fase ini, seorang anak mengalami apa yang disebut dengan realisme naif. Mereka menerima realitas-realitas di hadapan mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya.²⁵ Sifat tanpa kritik ini sampai kepada fase berikutnya ketika seorang anak mulai menggunakan daya rasionalnya.



Kalimat tokoh Rizal menunjukkan imanjinasinya terekonstruksi oleh pemahaman bahwa perempuan dan binatang (katak) sama saja, tidak ada perbedaan prinsipal. Dalam hal ini, menjadi keanehan yang sangat membingungkan jika pesantren –di mana tokoh Rizal dan Annisa tinggal– menciptakan penyamaan antara perempuan dan binatang. Sederhananya, ini hanyalah sekadar sentimen emosional dari seorang Abiedah atas masih adanya realitas sosial yang memosisikan perempuan sebagai properti yang dapat diperjualbelikan atau dibuang jika sudah tidak berguna.

Jika demikian, secara tidak langsung, Abiedah menuduh pesantren turut serta menyebarkan paham Yahudi yang memosisikan perempuan sebagai bagian dari *familia* seperti di Romawi, yaitu bagian integral dari warisan ayah yang terdiri dari uang, budak, dan kekayaan. Keluarga itu terdiri dari perempuan, budak, sapi, dan barang-barang lainnya.²⁶

Mengingat *basic* seorang Abiedah²⁷ yang mempunyai perhatian besar terhadap emansipasi berdasarkan gender, dialog antara tokoh Annisa dan Rizal tentu bukannya tanpa maksud. Dan tentunya bukan sekadar pemanis dalam novel PBS, tetapi mengandung tendensi atas hegemoni laki-laki terhadap perempuan.

2. Dikotomi urusan laki-laki dan perempuan. Ada pemisahan yang tegas antara urusan laki-laki dan perempuan. Ini berkaitan dengan kodrat bahwa perempuan "harus" melahirkan, menyusui, meanstruasi, dan sebagainya. Secara tegas pula bahwa laki-laki di antaranya mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Abiedah sangat memahami hal ini. Karena ini pula ia mengkritik fenomena sosial yang terkonstruksi oleh budaya patriarkhi.

Fenomena sosial tersebut berupa dikotomi urusan laki-laki dan perempuan yang tidak berlandaskan kepada konsep fitrah. Budaya patriarkhi telah memberi banyak pekerjaan kepada perempuan yang sebenarnya merupakan kewajiban bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai keleluasaan untuk bekerja di luar, sementara perempuan mempunyai beban mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan pergi ke pasar yang sebenarnya menurut agama tidak dikhususkan sebagai kewajiban perempuan. Ini tercermin dalam dialog antara tokoh Annisa dengan bapak dan kakaknya, Wildan berikut:

"Kenapa sih? Kalian pikir aku ini hantu? Kok semuanya tiba-tiba diam? Pasti sedang *ngerasani* aku, ya."

"Lho, lho, lho...kok malah *su'udzon*," kata bapak sambil mengusap rambutku. Aku jengkel dan merasa disepelkan, segera menepisnya.

"Jangan begitu, Nisa. Kita kan sedang bicara **urusan laki-laki**," tambah Wildan. (PBS, hal. 9-10)

"Urusan laki-laki" oleh Abiedah diterangkan melalui anekdot dalam adegan di sekolah. Harus diakui, sekolah dasar (SD) sering melakukan indoktrinasi bias gender melalui contoh-contoh kalimat sejenis ini:

A-yah per-gi ke kan-tor

I-bu me-ma-sak di da-pur

Bu-di ber-ma-in di ha-la-man

A-ni men-cu-ci pi-ring (PBS, hal 10)

Paragraf itu secara eksklusif memisahkan kerja-kerja yang patut dan yang tidak patut baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tidak patut seorang laki-laki memasak di dapur, sementara istrinya pergi ke kantor. Sampai di sini, esensi yang disampaikan novel PBS merupakan fakta-fakta budaya, bukan konsep agama.



Akibat yang harus diterima perempuan karena adanya pemisahan tersebut antara lain berupa pandangan sinis masyarakat ketika mereka meninggalkan "kewajiban-kewajiban" di rumah karena terlalu sibuk dengan urusan luar. Selain itu, karena bukan pekerjaan perempuan, maka upah yang diterima mereka lebih rendah dari laki-laki, meski khusus hal ini sudah semakin terantisipasi. Mengaitkan hal di atas dengan pesantren harus juga mempertimbangkan idealitas Islam, karena pesantren merupakan ujung tombak dalam syiar agama ini. Suatu realitas yang terjadi di pesantren ketika menabrak idealitas Islam tentunya akan menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri. Pertanyaan yang patut diajukan dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah, apa benar bahwa pemisahan yang tidak berlandaskan kepada konsep fitrah tersebut tidak sesuai dengan idealitas Islam di satu sisi, dan di sisi lain pesantren turut andil dalam konstruk pemisahan tersebut?

Untuk menjawab persoalan ini, mestinya dikembalikan ke konsep awal Islam mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Kewajiban istri merupakan hak suami, dan sebaliknya. Adanya hak dan kewajiban tersebut muncul sebagai konsekuensi logis dari perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan. Perbedaan bukan berarti tidak setara, justru *term* "setara" mengandung makna perbedaan.

Istri antara lain mempunyai kewajiban patuh kepada suami dalam hal ma'ruf, tidak melanggar rambu-rambu syariat. Kepatuhan ini termasuk di antaranya ketika suami melarang istri untuk bekerja. Akan tetapi, pemenuhan kewajiban seorang istri mengandung konsekuensi berupa kewajiban suami terhadap istri, antara lain memberi nafkah. Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah yang memerlukan intensitas berada di luar rumah, maka sepatutnya istri yang menyelesaikan urusan rumah. Ini menjadi konsep budaya yang mengadopsi nilai-nilai agama. Tidak ada masalah dalam hal ini selama masing-masing pihak menunaikan kewajiban masing-masing.²⁸

Dalam hal ini, pesantren sangat menekankan kepada pemenuhan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang, dan tidak melakukan ketimpangan meski diakui rata-rata pemimpin pesantren adalah laki-laki.

3. Konsep jodoh perempuan. Pernikahan Annisa yang pertama membawa nasib memilukan baginya. Suaminya, Syamsudin ternyata berperilaku seperti binatang. Terlalu sering menyiksa dan memaksa. Oleh Abiedah, pemaksaan dalam bersetubuh disebut pemerkosaan suami kepada istri. Beberapa tahun selama pernikahannya ini, ia menderita secara psikis maupun fisik.

Islam—dalam hal ini pesantren—membawa kedamaian, sementara penganiayaan membawa angkara. Setelah novel PBS terbit dan dibaca banyak orang, masih yang mengaitkan pesantren dengan nasib yang di alami oleh Annisa adalah mereka yang tidak tahu kondisi pesantren sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang secara mudah menerima informasi tanpa tahu kebenarannya. Secara konseptual, pesantren tidak akan melakukan atau mengijinkan kemungkaran terjadi. Dua hal yang berbeda tersebut menjadi seperti terkait karena Abiedah menciptakan tokoh Annisa yang anak seorang kiai pengasuh pesantren dan suami pertamanya, Syamsudin juga anak seorang kiai yang merupakan sahabat bapak Annisa.

Ada dua hal yang patut dijadikan poin dalam bagian pembahasan ini. *Pertama*, perempuan adalah makhluk yang tidak mempunyai hak menentukan jodohnya sendiri. Tanggung jawab untuk mencarikan jodoh perempuan terletak dipundak bapaknya. *Kedua*, sindiran Abiedah terhadap perjodohan antarsesama anak kiai untuk mempertahankan feodalisme pesantren.

Dua hal tersebut telah menyebabkan: *Pertama*, banyaknya perempuan yang harus mengalami penderitaan karena perempuan tidak bebas menikah dengan orang yang dicintai. Ini adalah penyiksaan yang paling kejam dalam ranah kemanusiaan seorang manusia, buktinya tentu saja demi cinta orang rela



melakukan apa saja. Ketika cinta yang tidak rasional mengalami perlakuan represif dengan alasan-alasan rasional yang terjadi, maka kompleksitas pergolakan batin yang terlahir dalam bentuk penderitaan.

Kedua, adanya budaya perjodohan antaranak kiai memberi kesimpulan bahwa pesantren menempatkan aspek nasab sebagai pertimbangan pertama dalam perjodohan, aspek-aspek yang lain seperti kualitas keilmuan dan akhlak menjadi terabaikan. Paling tidak, itulah yang ingin disampaikan novel PBS dalam kasus pernikahan pertama Annisa. Hanya saja, dengan penggunaan nalar yang sederhana, menghubungkan budaya pesantren dengan penderitaan perempuan dalam rumah tangga dalam konteks kasus Annisa di atas merupakan satu hal yang menggelikan. Kasus tersebut, jika memang ada tentu tidak bisa digeneralisasikan. Ini yang penulis sebut dengan ketidakterpisahan antara idealitas dan realitas. Seakan-akan realitas yang bersifat insidental tersebut merupakan refleksi dari ide-ide yang diusung pesantren.

Abiedah dalam proses kreatifnya memang melakukan riset lapangan terlebih dahulu di sebuah pesantren di Magelang. Riset tersebut tidak menunjukkan kasus pernikahan Annisa tersebut benar-benar ada atau hanya rekaan saja. Sebagai sebuah cerita fiksi, hal ini sah-sah saja. Akan tetapi, jika kembali menggunakan teori A. Teeuw bahwa sastra tidak pernah lahir dari kekosongan budaya, novel tersebut menimbulkan satu wacana omong kosong berupa korelasi budaya pesantren dengan penderitaan perempuan dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya, konsep perjodohan pesantren yang cenderung melakukan hubungan dengan sesama anak kiai memang ada. Ini sama sekali tidak salah, bahkan jika mengingat nasab merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perjodohan, konsep pesantren tersebut merupakan aplikasi dari ajaran Islam. Selanjutnya, meski anak-anak kiai banyak menikah dengan pasangan yang bukan menjadi pilihannya, toh banyak diantaranya yang sukses membangun mahligai rumah tangga yang berkualitas. Mereka dapat menjadi penerus dari para pendahulu sebagai pemimpin pesantren.

Fakta ini jauh berbeda dengan yang disuarakan banyak orang yang mendengungkan jargon kebebasan –artis dan sebagian feminis misalnya- yang menjadikan praktek perselingkuhan dan perceraian tidak lagi tabu. Alih-alih menikah, keluarga bagi mereka adalah institusi yang mengganggu kemerdekaan perempuan dengan segudang kewajiban.²⁹

E. PENUTUP: SINERGISITAS ANTARA LOGIKA, FAKTA, DAN IDEALITAS SASTRA

Ketiga poin di atas hanyalah sebagian kecil keganjilan novel PBS jika dikomparasikan dengan fakta faktual pesantren. Adanya keganjilan tersebut bisa jadi karena pembuatan novel tersebut dilandasi oleh asumsi eksistensi budaya patriarkhi dalam Islam yang dalam hal ini diwakili oleh institusi pesantren.

Subordinasi yang dilakukan budaya patriarkhi terhadap perempuan sama sekali tidak berkaitan dengan pesantren. Sebagai institusi pendidikan agama, pesantren mempunyai kecenderungan untuk memuliakan manusia tanpa membedakan gender. Benar bahwa perlakuan pesantren terhadap perempuan dengan laki-laki tidak sama, tetapi ketidaksamaan ini muncul dikarenakan perbedaan-perbedaan yang telah menyertai mereka masing-masing. Ini berkaitan dengan konsep fitrah.

Sebuah kesimpulan mengenai novel PBS adalah novel tersebut secara fiktif menggambarkan penjahatan yang dialami perempuan dalam konteks dunia pesantren. Fiktif karena berbagai fakta yang terjadi dalam novel tersebut sejatinya merupakan realitas yang tidak terjadi secara khusus di dunia pesantren. Artinya, pesantren bukan berposisi sebagai pelaku yang menyebabkan terjadinya realitas tersebut, melainkan sebagai sebuah aspek yang terjadi secara kebetulan, sebagaimana misalnya terdapat

ketidakadilan terhadap perempuan di sekolah, di pasar, atau di tempat lain. "Kebetulan" itu sengaja diciptakan di dalam novel PBS untuk memunculkan wacana akan adanya eksistensi subordinasi, pelabelan, ataupun ketidakadilan terhadap perempuan di pesantren.

Dalam konteks demikian, novel PBS telah tercipta melalui eksplorasi yang sangat subjektif melalui asumsi-asumsi yang berbentuk kecurigaan. Novel tersebut secara keseluruhan menggambarkan idealitas institusi pendidikan Islam untuk menggantikan institusi yang melakukan ketidakadilan. Pesantren secara faktual memang demikian sesuai dengan idealitas dalam novel tersebut, dan realitas-realitas yang tidak sesuai dengan idealitas tersebut bersifat fiktif belaka, lahir dari sebuah riset bermodalkan kecurigaan dan sentimen gender.

ENDNOTES

¹ Maggie Humm, *Dictionary of feminist Theories* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Terj. 2001), hal. 332.

² Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 102.

³ Wilayah privat perempuan justru oleh kaum feminis diperjuangkan sebagai isu yang masuk pada ruang publik, alasannya, budaya patriarkal dinilai banyak melanggar hak privasi perempuan ini. Dengan mempertahankan status quo di dalam ranah privat, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut menjadi tabu untuk dibicarakan, terlebih untuk dimasukkan dalam ranah hukum. Aspek ekonomi dan politik perempuan terkonstruksi dari awal melalui asumsi bahwa perempuan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Hal ini sebagai misal gaji pekerja perempuan lebih kecil dari gaji laki-laki. Selanjutnya, agama secara sistematis memberi justifikasi atas keberadaan budaya patrilineal melalui teks-teks suci. Dalam hal ini, agama dipahami sebagai hasil penafsiran para ahli agama yang mayoritas laki-laki.

⁴ Maggie Humm, *Dictionary of feminist Theories*hal. 333.

⁵ Salah satu feminis yang mengkaji secara mendalam mengenai institusi keluarga adalah Nawal Al-Sa'dawi, seorang feminis asal Mesir. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyorot ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau oleh otoritas. Institusi keluarga menjadi salah satu kajian pentingnya. Ia sendiri termasuk feminis yang tidak lagi mementingkan keberadaan institusi keluarga. Baginya, perempuan mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri termasuk masalah seksualitas, lesbian hanya salah satu bentuk dari ekspresi itu. Lihat karya-karyanya seperti *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlak* yang ditulis bersama rival satu negaranya, Hibah Rauf Izzat, diterjemahkan menjadi *Perempuan, Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis* (Jakarta: Erlangga), 2000. Kedua penulis tersebut berlawanan dalam pemikiran, khususnya mengenai peran agama, perempuan, dan moral. Dapat juga dibaca pemikiran Nawal al-Sa'dawi di bukunya yang lain seperti *al-Mar'ah wa al-Jins* dan *al-Unsa Hiya al-Asl*.



⁶ Nawal Al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlag* (Jakarta: Erlangga, Terj. 2000), hal. 216.

⁷ *Ibid.*, hal. 20.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 38.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 1999), hal. 144-145.

¹¹ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 100.

¹² Nawal Al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlag*.

¹³ Halimah Basri, dkk., "Penciptaan Wanita" dalam *Jurnal Yin Yang* (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010), hal. 144.

¹⁴ Hal ini menjadi salah satu argumen bahwa sejatinya, praktek poligami yang diperbolehkan Islam merupakan bentuk perlindungan untuk kaum perempuan dari budaya lokal sebelum kedatangan Islam. Lalu apakah argumen tersebut ketika dikontekskan dengan budaya saat ini dapat diterapkan tentunya melihat lokalitas masing-masing daerah dengan keragaman kultur yang dipegang. Lihat: Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 29.

¹⁵ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, hal. 28. Makna adil yang bersifat lahiriyah itu juga terlihat di dalam doa nabi Muhammad SAW berikut: "Ya Allah, inilah perlakuan adil yang maksimal yang mampu aku lakukan, janganlah Engkau mencela aku pada sesuatu yang Engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya."

¹⁶ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. an-Nisa: 1). Juhur mufasirin memaknai "dari padanya" sebagai tulang rusuk laki-laki. Lihat *Jurnal Yin Yang*, hal. 189.

¹⁷ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 271.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), hal. 246.

¹⁹ Halimah Basri, dkk., "Penciptaan Wanita", dalam *Jurnal Yin Yang* (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto), Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hal. 189.

²⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 201.

²¹ Sebagian kaum feminis menuduh Islam ikut mencitrakan perempuan sebagai sebuah benda yang dimiliki laki-laki, atau hamba yang dimiliki tuannya. Hal ini



antara lain tercermin dari adanya konsep mahar, larangan bepergian tanpa izin suami sementara suami mencari nafkah untuk mereka dianggap sebagai bayaran atas kepatuhan mereka. Perempuan mempunyai tugas yang kompleks di rumah, banyak yang mengatakan bahwa tugas-tugas itu lebih berat terlebih jika mereka diijinkan bekerja. Semua itu hanya alasan mengada-ada dari musuh-musuh Islam yang merindukan kehidupan hedonis yang semuanya diukur dengan materi. Mereka tidak berpikir bahwa semua konsep tersebut bertujuan untuk melindungi perempuan. Yang benar adalah perbudakan dan pembunuhan bayi perempuan dapat dihapuskan oleh Islam. Islam telah mengangkat derajat perempuan sejajar dengan laki-laki, sehingga mereka berposisi sebagai mitra. Banyak ayat yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti "Maka mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang lain" (QS. Ali Imran: 195); atau "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (QS. al-Nahl: 97). Sayang sekali, bahwa para penyerang Islam, khususnya dari kaum feminis Barat, hanya mengkaji ayat-ayat atau hadits yang mereka nilai bias jender, seperti tentang poligami, hak waris, kurangnya akal dan agama perempuan, dan sejenisnya. Semua dalil-dalil tersebut bersifat kausatif yang dengan demikian tidak dapat dibuat sebuah kesimpulan yang bersifat generalisasi atas keseluruhan agama Islam. Apakah Islam membela atau melanggar hak-hak perempuan dengan menciptakan masyarakat patriarkhal, merupakan bidang kajian umum yang kesimpulannya diambil dari kajian umum pula. Adapun bidang-bidang khusus perlu dibahas secara khusus sebagai pendukung dari kesimpulan umum tadi.

²² Kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh laki-laki terbatas pada lingkup keluarga, tidak menyentuh aspek sosial. Kepemimpinan ini juga tidak menawarkan kekuasaan mutlak, mengingat istilah yang digunakan berupa *al-gawwamah*, bukan *sulthan*. Kata *gawwam* sendiri mengandung dua arti penting, yaitu keadilan dan kebenaran. Dalam lingkup keluarga, seorang suami bertanggung jawab dalam hal material serta melindungi keluarga dan mengurusnya dengan adil. Pendapat ini datang dari Hibah Rauf Izzati yang dipertentangkan dengan Nawal Al-Sa'dawi yang mereduksi arti penting keluarga dalam kehidupan yang serba materialistis dan hedonis ini. Lihat Nawal Al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlaq*, hal. 134.

²³ Diterbitkan oleh Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ie Pondok Pesantren Lirboyo, terbit pertama kali pada 2006. Buku ini menjawab



kritik yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang mengkaji kitab 'Uqud al-Lujjain.

²⁴ A. Teeuw, *Tergantung pada Kata* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal.11.

²⁵ Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. VI, 2006), hal. 2006.

²⁶ Nawal El-Saadawi, *The Hidden Face of Eve* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terj. 2001), hal. 230.

²⁷ Sebagian besar tulisan Abiedah mempunyai tema besar tentang kesetaraan jender. Antara lain dapat dilihat seperti *Atas Singgasana* (novel), *Ibuku Laut Berkobar* (novel), dan sederet puisi dan cerpen bertema sama. Ia pernah juga aktif di Kelompok Diskusi Perempuan Internasional (KDPI) Yogyakarta. Tampaknya, hal ini tidak terlepas dari latarbelakang keluarganya yang lahir dari keluarga poligami.

²⁸ Darul Azka dan M. Zaenuri, *Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: 'Uqud al-Lujjain dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Suci* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ie Pondok Pesantren Lirboyo, 2006), hal. 26-27.

²⁹ Lihat pandangan-pandangan Nawal El-Saadawi dalam *The Hidden Face of Eve* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terj. 2001).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Teeuw: 1980. *Tergantung pada Kata*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Al-Saidawi, Nawal dan Hibah Rauf Izzat. 2000. *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlak*. Jakarta: Erlangga.
- Azka, Darul dan M. Zaenuri. 2006. *Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: 'Uqud al-Lujjain dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Suci*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ie Pondok Pesantren Lirboyo.
- Ariyia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Basri, Halimah. 2001. "Penciptaan Wanita" dalam *Jurnal Yin Yang*, Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010.
- El-Saadawi, Nawal. 2001. *The Hidden Face of Eve*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Humm, Maggie. 2001. *Dictionary of Feminist Theories*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS.
- Shihab, Quraish. 2002. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Zulkifli L. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.